KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tunda pembangunan: moratorium pembangunan gedung masih berlaku
Tanggal : Senin, 21 Agustus 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Tunda Pembangunan

Moratorium Pembangunan Gedung Masih Berlaku

JAKARTA, KOMPAS – Saat ini sebenarnya sudah tidak ada cukup alasan untuk melanjutkan rencana penataan kompleks parlemen karena sejumlah fraksi meminta hal itu ditunda. Apalagi pemerintah sudah menyatakan moratorium pembangunan gedung baru pemerintahan masih berlaku.

Rencana penataan kompleks parlemen mencakup pembangunan gedung baru untuk ruang kerja anggota DPR, alun-alun demokrasi untuk tempat masyarakat berunjuk rasa, museum, dan perpustakaan. Dari pagu anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun, sebanyak Rp 601 miliar dialokasikan untuk rencana tersebut.

Sebelumnya, sejumlah elite partai politik, seperti dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, meminta agar rencana penataan parlemen itu ditunda. Selain karena terbatasnya anggaran negara, juga karena penggunaan gedung parlemen pada saat ini masih bisa dioptimalkan (*Kompas*, 18/8).

"Sebagian anggota BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR berasal dari fraksi-fraksi yang sudah meminta agar rencana penataan kompleks parlemen itu ditunda. Maka, seharusnya mereka mengikuti perintah fraksinya," kata Direktur Komite Pemantau Legislatif Syamsuddin Alimsyah, Minggu (20/8).

Pertanyaan publik

Jika para anggota BURT tetap *ngotot* untuk melanjutkan penataan kompleks parlemen, lanjut Syamsuddin, akan muncul pertanyaan, misalnya, tentang kepentingan yang ada di balik rencana penataan tersebut.

Peneliti di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mengatakan, pimpinan DPR seharusnya juga membaca permintaan penundaan yang muncul dari internal DPR itu. "Jika sebagian besar pimpinan fraksi meminta menunda, DPR beserta alat kelengkapannya, termasuk BURT, tidak perlu melanjutkan rencana itu," ujarnya.

Apalagi Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menyatakan, pemerintah masih memberlakukan moratorium pembangunan gedung baru untuk pemerintahan. "Ini berarti rencana itu tak hanya ditentang di internal DPR, tetapi juga pemerintah," tambahnya.

Pemerintah diharapkan konsisten dengan kebijakan moratorium tersebut. Terlebih kondisi keuangan negara memang belum memungkinkan untuk memenuhi keinginan DPR dan DPD tersebut.

Hingga akhir pekan lalu, BURT DPR terus berupaya agar rencana penataan kompleks parlemen bisa direalisasikan. Salah satunya dengan meninjau gedung baru milik Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Konstitusi.

Luas ruangan hakim Mahkamah Konstitusi, lebih kurang 300 meter persegi, dijadikan contoh untuk ruangan anggota DPR. Namun, menurut rencana, ruangan anggota DPR nantinya, menurut Sekretaris Jenderal DPR Achmad Juned, hanya 117 meter persegi.

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyerahkan realisasi rencana penataan kompleks parlemen sepenuhnya kepada pemerintah. Pasalnya, anggaran untuk merealisasikan rencana itu ada di pemerintah. Jadi, jika pemerintah menilai realisasi rencana tersebut belum diperlukan, DPR tak bisa memaksa pemerintah merealisasikannya.

(ZAK/APA)